

realisasi TA 2022. Pendapatan Hibah tersebut merupakan setoran kontribusi biaya operasional kantor bersama samsat bulan Januari sampai dengan Desember dari PT Jasa Raharja (Persero) di TA 2023 yang telah disahkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara PT Jasa Raharja dan Gubernur Bali dengan Nomor P/67/SP/2023 (1568 Tahun 2023) pada tanggal 5 Juni tahun 2023, tentang Hibah Uang kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk Mendukung Operasional Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap; dan

- b. Capaian realisasi Pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis lebih rendah dibandingkan dengan anggaran TA 2023 dan realisasi TA 2022 karena sumbangan tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari kontribusi wisatawan. Dalam Pasal 4 (ayat) 2 Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan Untuk Perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali serta dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penerimaan dan Penggunaan Kontribusi Wisatawan Untuk Perlindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali dinyatakan bahwa kontribusi wisatawan dapat berupa barang dan/atau uang yang bersifat sukarela, hal ini menjadi penyebab rendahnya penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis dari kontribusi wisatawan. Pada tanggal 8 Agustus 2023 Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali yang mencabut Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan Untuk Perlindungan Lingkungan Alam Dan Budaya Bali. Peraturan baru tersebut mulai berlaku tanggal 14 Februari 2024 dan didalamnya mengatur bahwa kontribusi wisatawan tidak lagi berupa barang dan/atau uang yang bersifat sukarela melainkan berupa uang dengan tarif pungutan sebesar Rp150.000,00 dengan pembayaran secara elektronik (*e-payment*). Teknis tata cara pembayaran pungutan ditetapkan dalam Pergub Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing yang mulai berlaku tanggal 7 Februari 2024.

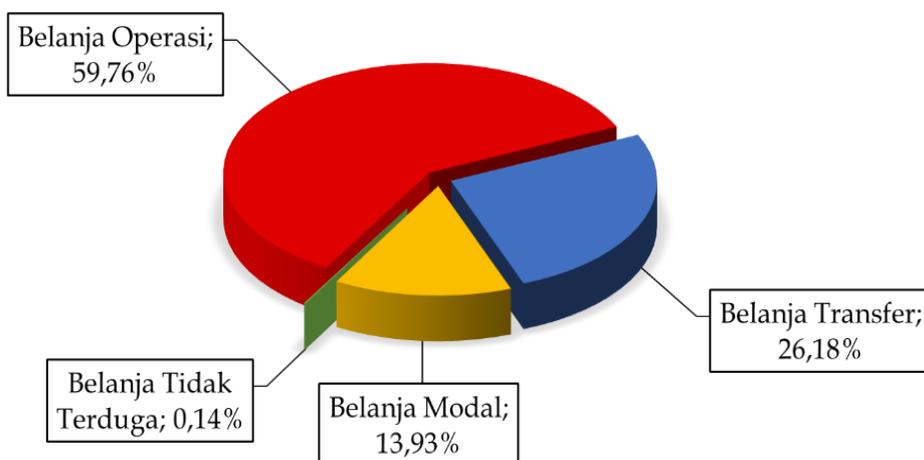
### 5.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini adalah Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

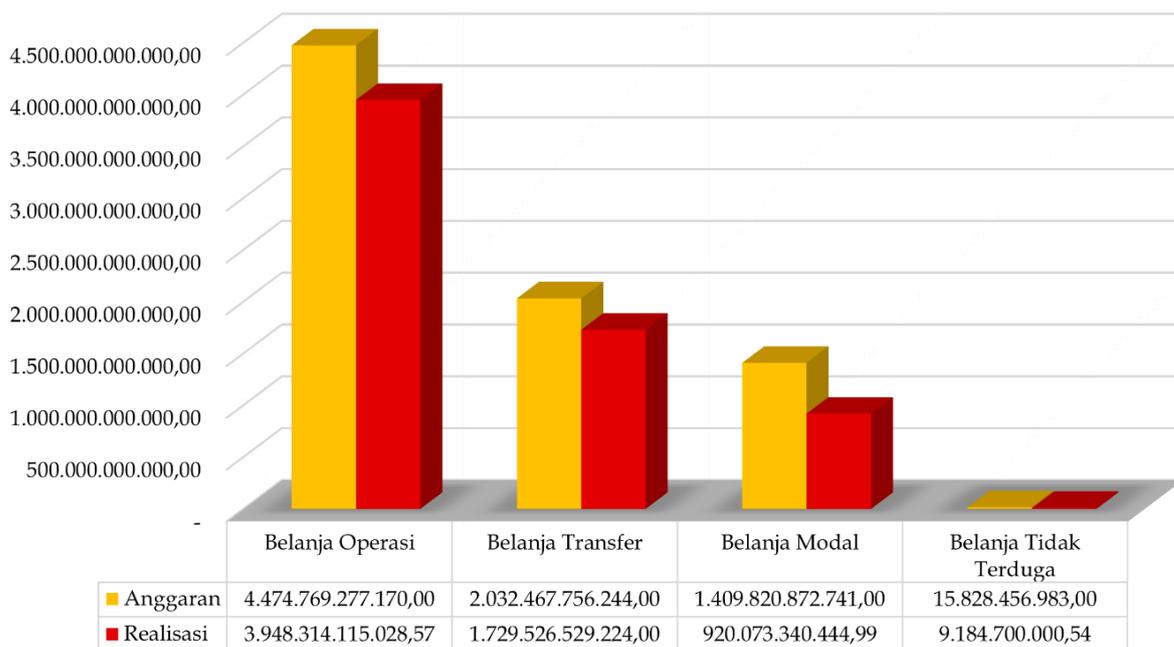
Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	4.474.769.277.170,00	3.948.314.115.028,57	88,24	3.791.897.703.325,73
Belanja Modal	1.409.820.872.741,00	920.073.340.444,99	65,26	1.452.064.568.386,86
Belanja Tidak Terduga	15.828.456.983,00	9.184.700.000,54	58,03	4.759.779.107,00
Belanja Transfer	2.032.467.756.244,00	1.729.526.529.224,00	85,09	1.500.721.131.290,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.932.886.363.138,00</b>	<b>6.607.098.684.698,10</b>	<b>83,29</b>	<b>6.749.443.182.109,59</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Daerah TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022 sebesar Rp142.344.497.411,49 atau 2,11%. Capaian realisasi Belanja Daerah merupakan hasil tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 5232 Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023 dan Surat Edaran Nomor 8004 Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang pengendalian pelaksanaan belanja daerah pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023. Pelaksanaan belanja daerah diutamakan untuk kegiatan yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas dengan memperhatikan ketersediaan dana di Kas Daerah. Komposisi realisasi

Belanja Daerah TA 2023 dan capaian realisasi Belanja Daerah terhadap anggaran di TA 2023 digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 5.5 Komposisi Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023



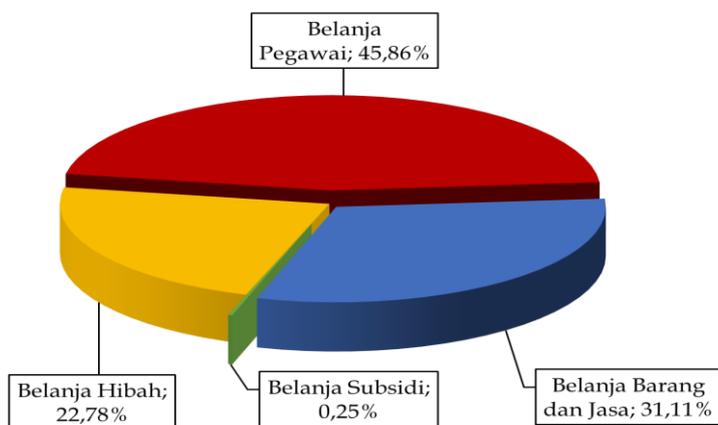
Gambar 5.6 Capaian Realisasi Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023

### 5.1.2.1. Belanja Operasi

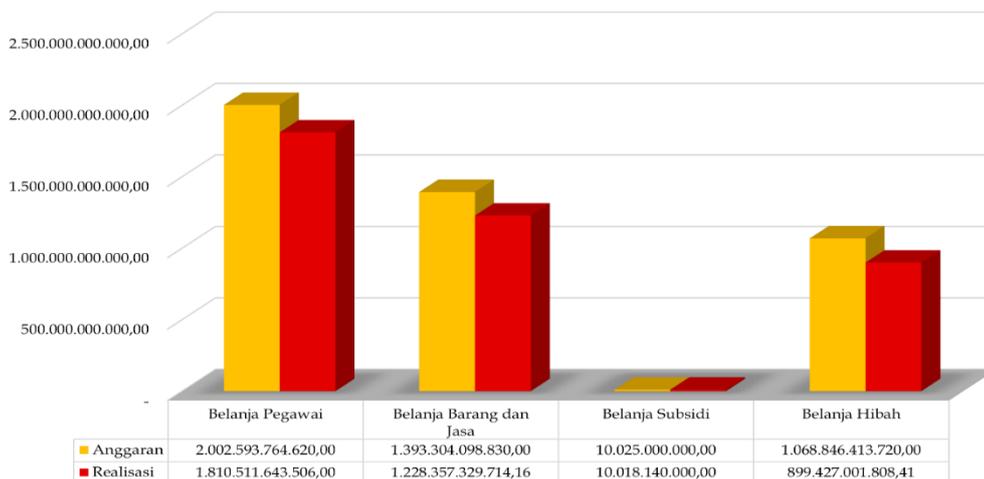
Berikut ini adalah Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	2.002.593.764.620,00	1.810.511.643.506,00	90,41	1.740.899.431.377,08
Belanja Barang dan Jasa	1.393.304.098.830,00	1.228.357.329.714,16	88,16	1.690.049.421.497,65
Belanja Subsidi	10.025.000.000,00	10.018.140.000,00	99,93	4.372.945.000,00
Belanja Hibah	1.068.846.413.720,00	899.427.001.808,41	84,15	356.436.889.451,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	139.016.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.474.769.277.170,00</b>	<b>3.948.314.115.028,57</b>	<b>88,24</b>	<b>3.791.897.703.325,73</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Operasi TA 2023 mengalami peningkatan dari TA 2022 sebesar Rp156.416.411.702,84 atau 4,13%. Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan capaian realisasi Belanja Operasi terhadap anggaran di TA 2023 digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 5.7 Komposisi Realisasi Belanja Operasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023



Gambar 5.8 Capaian Realisasi Belanja Operasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2023

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi pada masing-masing PD dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

#### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta yang direalisasikan pada TA 2022. Besaran anggaran, realisasi dan persentase capaian TA 2023 serta realisasi TA 2022 diuraikan sebagai berikut: